

ABSTRAK

Bahwa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 huruf (a) Menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi “Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. sesuai dengan hasil survey penulis bahwa di kecamatan Loloda secara keseluruhan belum mengikuti prosedur normativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena dalam kenyataannya, Pemerintah Desa untuk membuat satu peraturan desa mereka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam membuat peraturan desa tersebut. Padahal secara normativ berdasarkan pasal 55 huruf (a) diatas adalah kewenangan BPD untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa dan dapat mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara?(2) Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa? Penelitian ini bertujuan: (1) Mendeskripsikan peran BPD Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2) Mendeskripsikan Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap peran BPD dalam proses penyusunan dan penetapan Perdes di Kecamatan Loloda (3) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang benar akan tetapi belum maksimal sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Peraturan Mendagri No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis.

Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di Kecamatan Loloda dalam meringkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara *Intern dan Ekstern*. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari PEMDA serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Legal Decision Making, Peraturan Desa*

ABSTRACT

That in Act 6 of 2014 on the village of section 55 (a) Mention that serves the Village Consultative Body "Discussing and agreeing Draft Regulation joint village Village Head". according to the results of the survey authors found in the district as a whole Loloda Village not follow the procedures referred to in Act 6 of 2014 about the village. Because in reality, the village government to make the rules of their village cooperate with the government and local governments to use the services of third parties in making the village regulations. Though the normativ pursuant to Article 55 paragraph (a) above is to design regulatory authority BPD village with village heads and village regulations can socialize to the public. Issues examined in this study were: (1) How is the preparation and adoption of regulations Loloda Village, Halmahera Barat City province. North Maluku? (2) What constraints are faced BPD district. Loloda, Kab. Halmahera Barat province. North Maluku in the process of preparation and adoption of the rules of the village? This study aims to: (1) Describe the role of BPD Based on Law No. 6 of 2014 concerning the village. (2) Describe the implementation of Law No. 6 of 2014 on the village of BPD role in the process of preparation and adoption of in District Loloda (3) Describe the constraints faced by BPD in the implementation of the legislative function. Method research approach used in this study is juridical sociological nature. Data collection methods used are: (1) interview, (2) method of the document. While the analysis method used is the analysis method diskritif Juridical Empirical with the deductive approach.

The results showed that the manufacturing Village Regulations have been implemented through the stages right but not maximized in accordance with Law No. 6 of 2014 on Rural Affairs Minister in conjunction with Regulation No. 29 Year 2006 on Guidelines for the Establishment and making Mechanisms Village Regulation, namely through the initiation stage, socio-political and juridical.

Conclusions from the above results is BPD in carrying out its legislative function, namely the process of making village regulations in accordance with legislation existing legislative function BPD but can not run optimally, this is indicated with less BPD in District Loloda in framing regulation village which is still conventional or customary in the form of unwritten rules. As for the measures taken to overcome the obstacles that are Internal and External. So that the suggestions put forward in this Tesis is the need for special attention from the local government as well as the necessary training Rural Regulation ways of arranging and designing for the village government.

Keywords: Rural Parley Agency (BPD), Legal Decision Making, Rural Regulation